

PARTISIPASI UMAT ISLAM DALAM PEMBANGUNAN POLITIK (Perjuangan Kemerdekaan dan Mengisi Kemerdekaan)

Oleh : Wahyuddin G.

Abstrak

Dalam sejarah politik nasional, partai Islam mampu mengidentifikasi dirinya dengan aspirasi politik Bumi Putera untuk memperjuangkan kemerdekaan. Demikian pula pada penyusunan Dasar Negara Indonesia merdeka peran politik umat Islam sangat menonjol dengan lahirnya Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Negara Pancasila sejak 18 Agustus 1945. Setiap peristiwa penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, peran politik umat Islam sangat menentukan, sejak perjuangan kemerdekaan, pengisian kemerdekaan, dan perubahan rezim kekuasaan dari Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.

Kata kunci: Umat Islam; pembangunan; politik

A. Pendahuluan

Dalam upacara penerimaan Guru Besar Tetap dalam bidang Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab IAIN Alauddin 11 November 2004, Prof. Dr. H.M. Saleh A. Putuhena menyatakan Islam dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut beliau, hubungan yang erat antara Islam dan politik itu paling tidak dapat dilihat dari dua hal.¹ *Pertama*, dari sudut Islam sebagai doktrin, terdapat beberapa ayat Alquran yang sering diinterpretasikan sebagai konsep politik menurut Islam. Misalnya: Q.S. al-Maidah /5: 17-18, Q.S. al-Baqarah/2: 30, Q.S. al-Imran/3: 26 dan 159, Q.S. an-Nisa/4: 59, Q.S. asy-Syu'ara : 42. *Kedua*, sebagai realitas sosial.

Untuk pertama kalinya masyarakat Islam terbentuk setelah peristiwa Hijrah tahun 1622 M di Madinah melalui kontrak politik antara Nabi Muhammad dengan penduduk kota itu yang terdiri atas kelompok Muhajirin, Anshar, dan kelompok Yahudi untuk mendirikan suatu Negara Madinah (*City State*) dengan Muhammad saw. sebagai kepala negara. Sejak itu, Islam atau tepatnya masyarakat Islam tidak dapat dipisahkan dengan politik yang *inheren* dengan masyarakat itu sendiri.

Dilihat dari sudut ideologi dasar, munculnya Partai Politik di Indonesia secara garis besar adalah sebagai aktualisasi dari tiga aliran atau pandangan politik. Ketiga

¹ M. Saleh Ahmad Putuhena, Islam dan Politik: *Pergumulan Tanpa Akhir Rekonstruksi Pantulan Pengalaman Indonesia*, IAIN Alauddin 2004, h. 2-4

aliran politik itu ialah Islam, nasionalisme, dan markisme/sosialisme. Penyelidikan secara mendalam dan komprehensif tentang peran politik umat Islam di Indonesia menarik untuk dikaji, karena dalam sejarah politik Indonesia, gerakan politik yang pertama kali muncul bercorak nasional adalah partai Islam. Peran politik umat Islam cukup penting dan berarti bagi perjuangan kemerdekaan, pengisian kemerdekaan, dan bagi pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Bagaimana peran politik umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan merupakan hal pokok pengkajian berikut.

Perjuangan Kemerdekaan

1. Sarekat Islam

Aktualisasi politik Islam, muncul pertamakali dalam Sarekat Islam (SI), sebagai partai politik pertama dalam sejarah Indonesia yang bercorak nasional. Dengan demikian, Sarekat Islam adalah partai pelopor. Partai ini menjadi dinamis dibawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto. Salah satu aspek yang menarik dari Sarekat Islam pada periode awal karena ia mampu mengidentifikasikan dirinya dengan aspirasi politik Bumi Putera untuk perjuangan kemerdekaan.² Dengan kata lain denyut nadi perjuangan SI ialah denyut nadi rakyat terjajah. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Sarekat Islam pada tahun-tahun awal berdirinya begitu menjulang. Interposisi elit tradisional yang berpendidikan Barat dan Cina cenderung menyamakan peranan Belanda sebagai pengisap tenaga pribumi. Inilah sebabnya sejak permulaan Gerakan Politik SI bercorak anti kolonial, anti Cina, bersifat Islami.³

Islam segera menjadi senjata ideologis dari berbagai gerakan melawan penjajah yang kafir, dan gerakan keislaman untuk membantu dan memajukan kepentingan Bumi Putera sebagaimana yang terjadi pada Sarikat Dagang Islam (SDI) 1905, sebagai gerakan massa pertama yang besar dan diorganisasi secara politik, sehingga dengan mudah ditafsirkan sebagai nasionalisme yang kuat.

Sarekat Dagang Islam (SDI) yang lahir 1905 berkembang menjadi Sarekat Islam tahun 1911. Sarekat Islam yang semula sekedar bertujuan memajukan perdagangan saling membantu, terbinanya rohani dan jasmani serta memajukan kehidupan beragama umat Islam, berkembang menjadi gerakan politik yang mencita-citakan kemerdekaan dalam Kongres ke-III di Yogyakarta 1914 watak politiknya telah tampak dengan membentuk Central Sarekat Islam (CSI) untuk menyatukan cabang-cabang di berbagai daerah. Dalam kongres CSI di Bandung 1916, mereka telah menggunakan istilah 'Kongres Nasional'. Dari kenyataan seperti terlihat dalam kongres CSI yang bersifat massal dan nasional, dapat dikatakan bahwa Sarekat Islam merupakan organisasi massa yang pertama memperkenalkan konsep nasional *far excellence* di

² M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Indonesi: Sebuah Potret Pasang Surut* (Jakarta, CV. Rajawali, 1983), h. VII (Pengantar)

³ Nurcholis Madjid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan* (Bandung, Mizan, 1994), h. 87

tengah-tengah rakyat.⁴ Islam menjadi tempat menegaskan identitas diri ketika berhadapan dengan kekuatan asing. Karena itu, Sarekat Islam menjadi gerakan politik pertama di Indonesia yang tidak saja meletakkan dasar, tetapi sekaligus menegaskan kesadaran nasionalisme moderen di Indonesia.

Menurut Kuntowijoyo, faktor utama sukses Sarekat Islam, karena pada awalnya Sarekat Islam tidak membedakan Islam *ortodox* dan *sinkretis*. Sarekat Islam bergerak dengan cara mengabaikan perbedaan ciri kultural umat Islam yang muncul akibat penghayatan dan komitmen relegiusitasnya. Dalam tataran sosial, Sarekat Islam mendasarkan diri pada gerakan rakyat jelata yang di dalamnya terdapat kaum tani, buruh, dan pedagang kecil yang mereka sebut kaum Kromo. Di atas mereka terdapat kaum bangsawan, peodal, birokrat, Cina, orang-orang Kristen, dan Pejabat Kolonial Belanda. Dengan ini Kuntowijoyo menyimpulkan, sukses mobilisasi massa Sarekat Islam dipengaruhi pula oleh analisis mereka tentang formasi sosial dengan memakai konsep kelas.⁵

MIAI – MASYUMI

Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) didirikan di Surabaya pada September 1937, disponsori oleh dua organisasi besar, NU dan Muhammadiyah. MIAI merupakan federasi organisasi Islam dan bercirikan

Semangat non koperatif terhadap pemerintahan penjajah Belanda.⁶ Karena bercirikan semangat non koperatif terhadap penjajah, maka pada awal kedatangan Jepang di Indonesia, sangat khawatir dengan keberadaan MIAI. Karena itu Jepang mencoba membentuk organisai federatif yang akan menggantikan kedudukan MIAI. Lahirlah kemudian Persiapan Persatuan Umat Islam (PPUI) yang diketuai Abikusno Cokrosuyoso yang juga ketua PSII.

Pada tanggal 14 September 1942 PPUI mengadakan pertemuan di Jakarta yang dihadiri pimpinan organisasi serta tokoh-tokoh Islam. Agenda utamanya adalah membentuk satu wadah persatuan baru. Namun pertemuan tersebut gagal melahirkan organisasi baru, bahkan mempertahankan keberadaan MIAI, memilih ketua baru W. Wondoamiseno dari PSII dan menyetujui perpindahan kantor pusat dari Surabaya ke Jakarta.

Meskipun telah memberi pengakuan secara resmi, Jepang tampaknya tidak percaya sepenuhnya kepada MIAI. Organisasi ini tidak banyak diberi peran, bahkan cenderung dibatasi. Selanjutnya MIAI dibubarkan dan digantikan dengan Majelis Syura Muslimin Indonesia (MASYUMI) pada bulan November 1943. pembubaran MIAI dan

⁴ Muhammad Iskandar dan Ahmad Syahid, *Islam dan Nasionalisme dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid V* (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 396

⁵ *Ibid.*

⁶ Saiful Umam, *Politik Islam Jepang dalam Ensiklopedia Dunia Islam Jilid V* (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 406

pembentukan MASYUMI, tampaknya didasari kekhawatiran pemerintah Jepang akan potensi non kooperatif MIAI terhadap pemerintah Militer Jepang.

Tujuan utama pembentukan MASYUMI adalah memperkuat persatuan seluruh organisasi Islam, disamping membantu pemerintah militer Jepang menuju terciptanya Asia Timur Raya.⁷ Keanggotaan MIAI adalah perseorangan, sedang keanggotaan MASYUMI adalah organisasi Islam. Ketua MASYUMI dipercayakan kepada KH Hasyim Asy'ari (Ketua Rois Akbar NU), didampingi empat ketua masing-masing Mas Mansyur (Muhammadiyah), Wahid Hasyim (NU), Zainal Arifin (NU), dan Anwar Cokroaminoto (PSII). Meskipun MIAI dan MASYUMI bukan partai politik, tetapi partisipasi di bidang politik sangat besar dan nyata.

Perjuangan Pasca Kemerdekaan

Perumusan Dasar Negara

Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada Mei-Juli 1945 terjadi perdebatan yang bersifat ideologis politis antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Dalam perdebatan panjang itu, kelompok Islam diwakili antara lain KH A. Sanusi dan KH Abdul Halim (PUI), Ki Bagus Hadi Kusuma, KH Mas Mansyur, dan Abdul Kahar Muzakkir (Muhammadiyah), KH A. Wahid Hasyim dan KH Masykur (NU), Sukiman Warjosanjoyo (PII), Abi Kusno Cokrosuyoso (PSII), dan Agus Salim (Penyadar). Juru bicara kelompok nasionalis adalah: Soekarno, Muhammad Hatta, Soepomo, dan Rajiman Wirjodiningrat.⁸

Juru bicara kelompok Islam memperjuangkan Islam sebagai dasar Negara Indonesia merdeka. Sedangkan kelompok nasionalis memperjuangkan nasionalisme sebagai dasar negara. Kedua kelompok ini, masing-masing mempertahankan keinginannya. Perdebatan Kelompok Islam dan nasionalis tentang dasar Negara Indonesia merdeka, barulah mereda ketika Soekarno menyarankan agar kedua belah pihak bersedia berkorban, karena sangat mendesak memikirkan situasi Indonesia merdeka. Akhirnya para anggota BPUPKI itu bersepakat bahwa masa depan Indonesia didasarkan kepada: percaya kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menerima Islam sebagai dasar Negara, dan bahwa presiden RI harus seorang muslim.⁹ Kesepakatan ini kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Carter).

Tetapi segera tampak di permukaan bahwa kompromi itu pada dasarnya dibangun di atas landasan yang tidak kokoh. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sore sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Piagam Jakarta kembali dipersoalkan. Atas desakan Muhammad Hatta, kelompok Islam dengan tokoh Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singadimejo dan Teuku Muhammad Hasan (Wakil Umat Islam Sumatera) bersepakat menghapuskan unsur-unsur legalistik formal

⁷ Ibid., h. 407

⁸ Bahtiar Efendi dan Ali Munhanif, *Indonesia Pasca Kemerdekaan dalam Ensiklopedia Dunia Islam Jilid V* (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 433

⁹ Ibid., h. 434

Islam dalam pembukaan UUD 1945, terutama mengenai Islam sebagai dasar Negara, persyaratan bahwa presiden RI harus seorang muslim, dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebaliknya, unsur teologi monoteistik dimasukkan kedalam sila pertama dalam pancasila, sehingga berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Dari fakta tersebut di atas tampak bahwa partisipasi politik umat Islam dalam perumusan dasar Negara Indonesia merdeka sangat menentukan. Mereka berhasil menetapkan legalitas formal Islam sebagai dasar Negara, tetapi demi persatuan seluruh bangsa, mereka bersedia menghapus unsur-unsur yang dinilai pihak minoritas non muslim dapat mengganggu perjalanan sejarah bangsa Indonesia kedepan.

Wahana Perjuangan Politik

Usia Piagam Jakarta dalam sejarah konstitusi Indonesia, tidaklah mengendorkan semangat perjuangan politik Indonesia di alam merdeka. Sebuah kongres umat Islam yang berlangsung di Aula Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 7-8 November 1945, berhasil membentuk wahana perjuangan politik umat Islam yang diberi nama MASYUMI.¹¹ Pendukung utama organisasi ini dari kalangan NU dan Muhammadiyah MASYUMI ini tidak ada kaitannya dengan MASYUMI bentukan Jepang. Melalui MASYUMI, sebuah federasi organisasi Islam yang belakangan menjadi partai politik bagi umat Islam. Dengan MASYUMI, kelompok Islam berhasil memobilisasi kekuatan politik cukup besar. Kebesaran MASYUMI tampak pada beberapa kali kesempatan dipercaya memimpin kabinet, seperti Kabinet Muhammad Natsir (1950-1951), Kabinet Sukiman (1951-1952), dan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956).¹² Prestasi Kabinet Burhanuddin terutama pada keberhasilannya menyelenggarakan Pemilihan Umum pertama dalam sejarah RI. Prestasi kedua adalah dibubarkannya Uni Indonesia-Belanda secara Uni Lateral, suatu keberanian politik yang patut dicatat. Prestasi lainnya ialah mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat, yang pada masa kabinet Ali Sastrowijoyo sangat merosot.

Secara umum dapat dikatakan bahwa perilaku politik MASYUMI selama periode kritis pun tetap mempertahankan kemurnian cita-cita kemerdekaan, dibuktikan oleh sikapnya yang menolak perjanjian dengan Belanda yang dinilai menodai perjuangan bangsa. Prinsip kemurnian perjuangan itu juga dibuktikan dengan beroposisi terhadap presiden Soekarno yang menyimpang dari Negara demokrasi dengan konsep demokrasi terpimpin (1959-1965).

Pada peristiwa G 30 S/PKI, umat Islam bekerjasama dengan tentara bangkit mengamankan Negara RI dengan menumpas pengkhianatan PKI. Partai dan organisasi massa Islam secara tegas menolak kebijaksanaan politik Presiden Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin, Kabinet Gotong Royong yang memasukkan semua partai politik

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ A. Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia: pada Masa Demokrasi terpimpin (1959-1965)* (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), h. 30

¹² Bahtiar Efendi dan Ali Munhanif, *Op. cit.*, h. 346

termasuk PKI dalam kabinet (NASAKOM). Umat Islam menyambut baik pembubaran PKI, mendukung berdirinya Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto tahun 1965.

Runtuhnya Orde Baru, berganto Orde Reformasi merupakan jasa besar partisipasi politik umat Islam. Tokoh-tokoh seperti Amin Rais, Yusril Ihza Mahendra, Abdurrahman Wahid, dan lain-lain merupakan tokoh yang sangat menonjol dalam peristiwa ini. Amin Rais menjadi lokomotif gerakan reformasi, bersama dengan mahasiswa dan unsur bangsa lainnya mengerakkan demonstrasi besar-besaran berhasil memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatan pada tahun 1998. Tidak mengherankan bila hasil pemilu 1999 menempatkan Amin Rais sebagai ketua MPR, Abdurrahman Wahid sebagai presiden, dan Yusril Ihza Mahendra menempati posisi penting dalam kabinet.

Begitulah umat Islam selalu memiliki peran politik yang sangat menentukan dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, sejak zaman perjuangan kemerdekaan, menentukan dasar Negara Indonesia perubahan dari Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Meskipun peran politik umat Islam selalu menonjol dalam setiap perubahan penting sejarah bangsa Indonesia, tetapi tidak pernah secara stabil mengendalikan kekuasaan untuk menerapkan prinsip Islam secara kaffah dalam pemerintahan.

Kesimpulan

Dalam sejarah politik nasional, partai Islam mampu mengidentifikasikan dirinya dengan aspirasi politik Bumi Putera untuk memperjuangkan kemerdekaan. Demikian pula pada penyusunan Dasar Negara Indonesia merdeka peran politik umat Islam sangat menonjol dengan lahirnya Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Negara Pancasila sejak 18 Agustus 1945. Setiap peristiwa penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, peran politik umat Islam sangat menentukan, sejak perjuangan kemerdekaan, pengisian kemerdekaan, dan perubahan rezim kekuasaan dari Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Saleh Ahmad Putuhena, *Islam dan Politik: Pergumulan Tanpa Akhir Rekonstruksi Pantulan Pengalaman Indonesia*, IAIN Alauddin 2004
- M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Indonesi: Sebuah Potret Pasang Surut* Jakarta, CV. Rajawali, 1983
- Nurcholis Madjid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, Bandung, Mizan, 1994
- Muhammad Iskandar dan Ahmad Syahid, *Islam dan Nasionalisme dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam Jilid V* Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
- Saiful Umam, *Politik Islam Jepang dalam Ensiklopedia Dunia Islam Jilid V* Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
- Bahtiar Efendi dan Ali Munhanif, *Indonesia Pasca Kemerdekaan dalam Ensiklopedia Dunia Islam Jilid V* Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
- A. Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia: pada Masa Demokrasi dipimpin (1959-1965)*, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988

